

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SISTEM KEUANGAN DESA
DALAM PELAPORAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Muhammad Geri Andriadi
NPP. 32.0227

Asdaf Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Keuangan Publik
Email: geriandriadi03@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Eljawati., S.Sos, MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The main issues raised include the village apparatus' low understanding of the system, the lack of supervision from the local government, and limited resources system, lack of supervision from the local government, and limited human resources in the management of village human resources in village financial management. **Purpose:** This research This study aims to analyze the effectiveness of Village Financial System management (Siskeudes) in village financial reporting in Muara Enim Regency, South Sumatra Province South Sumatra Province. **Method:** This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Informants in this study came from the Community and Village Empowerment Office and the parties directly involved in village financial management directly involved in village financial management. **Result:** This study shows that the effectiveness of Siskeudes in village financial reporting in Muara Enim Regency can be assessed through five main dimensions. In the program understanding dimension, some village officials still lack a full grasp of the system's functions and procedures. In the target accuracy dimension, although the system has been implemented in all villages, its use remains suboptimal due to limited human resources and technical support. In the timeliness dimension, financial reporting is often delayed due to internet connectivity issues and the continued use of offline systems. In the goal achievement dimension, Siskeudes has begun to support the preparation of more accurate and accountable financial reports. Lastly, in the real change dimension, there is growing awareness among village officials regarding good financial governance, although further training and improvements in system infrastructure are still needed. **Conclusion:** Siskeudes in Muara Enim Regency is considered quite effective in increasing transparency and accountability in village financial reporting even though it still faces technical and human resource constraints. This effectiveness can be improved through training, system improvements, and more optimal supervision from the local government.

Keywords: Effectiveness, Village Financial System, Financial Reporting

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan utama yang diangkat meliputi masih rendahnya pemahaman aparat desa terhadap sistem, minimnya pengawasan dari pemerintah daerah, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pelaporan keuangan desa di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Siskeudes dalam pelaporan keuangan desa di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari lima dimensi utama. Pada dimensi pemahaman program, masih ditemukan aparatur desa yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan prosedur penggunaan Siskeudes. Pada dimensi tepat sasaran, sistem telah diterapkan di seluruh desa namun belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan SDM dan dukungan teknis. Pada dimensi tepat waktu, pelaporan sering mengalami keterlambatan akibat kendala jaringan internet dan sistem yang masih offline. Pada dimensi pencapaian tujuan, Siskeudes mulai mampu mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Sedangkan pada dimensi perubahan nyata, terlihat adanya peningkatan kesadaran aparatur terhadap pentingnya tata kelola keuangan, meskipun masih dibutuhkan pelatihan lanjutan serta penguatan infrastruktur dan sistem. **Kesimpulan:** Siskeudes di Kabupaten Muara Enim dinilai cukup efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan desa meskipun masih menghadapi kendala teknis dan SDM. Efektivitas ini dapat ditingkatkan melalui pelatihan, perbaikan sistem, dan pengawasan yang lebih optimal dari pemerintah daerah.

Kata kunci: Efektivitas, Sistem Keuangan Desa, Pelaporan Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Desa merupakan pemerintahan dalam lingkup terkecil yang secara langsung melayani masyarakat di wilayah pedesaan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah pengelolaan keuangan desa yang mencakup seluruh kegiatan dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat 6). Dalam pengelolaan keuangan daerah, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama yang harus diwujudkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas anggaran publik (Mardiasmo, 2017).

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa kerap menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pelaporan. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa masih sering bermasalah, baik secara administratif maupun substansi, sehingga membuka celah terjadinya penyimpangan anggaran. Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa tren korupsi dana desa meningkat dari tahun ke tahun, dengan 533 kasus dan 1.173 tersangka pada tahun 2021, serta kerugian negara sebesar Rp162,2 miliar pada tahun 2023. Hal ini menjadi bukti bahwa rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi faktor krusial.

Di Kabupaten Muara Enim, masalah serupa turut terjadi. Beberapa desa diketahui belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan optimal dan belum memiliki pedoman pengelolaan keuangan yang tertib administrasi. Padahal, alokasi dana desa terus meningkat, mencapai Rp202 miliar pada tahun 2024, naik dari Rp184 miliar pada tahun sebelumnya (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim, 2024). Namun peningkatan alokasi dana ini tidak selalu diiringi oleh kualitas pengelolaan yang

memadai. Bahkan, masih ditemukan kepala desa yang terjerat kasus korupsi meski realisasi anggaran dilaporkan mencapai 100%.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mengembangkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai sistem aplikasi pelaporan keuangan desa. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, implementasi Siskeudes di Kabupaten Muara Enim masih dilakukan secara *offline*, yang menimbulkan risiko keterlambatan pelaporan dan potensi kesalahan administrasi.

Kelebihan dan kekurangan Siskeudes menjadi latar belakang penting dalam mengkaji efektivitasnya. Menurut Rahayu dkk. (2021), efektivitas suatu program ditentukan oleh lima indikator utama, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada sejauh mana Siskeudes memenuhi indikator tersebut dalam konteks pelaporan keuangan desa di Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan uraian di atas, penting dilakukan penelitian mengenai efektivitas pengelolaan Sistem Keuangan Desa dalam pelaporan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi sistem yang ada, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Berbagai penelitian terdahulu telah membahas implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di berbagai daerah, dengan fokus pada efektivitas sistem, tingkat pemahaman aparatur desa, serta pengaruhnya terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Ridwan, 2019; Novirania, 2018; Wahyuni, 2019). Mayoritas studi tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menyoroti aspek teknis penggunaan aplikasi dan persepsi pengguna terhadap efektivitas sistem.

Namun demikian, masih terbatas penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes dalam konteks pelaporan keuangan desa secara menyeluruh, terutama pada daerah yang masih menggunakan sistem *offline*, seperti Kabupaten Muara Enim. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu belum secara eksplisit mengukur efektivitas pengelolaan Siskeudes berdasarkan indikator-indikator teoritis yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas menurut Sutrisno dalam Rahayu dkk. (2021), yang mencakup lima indikator utama, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata yang belum banyak digunakan dalam studi sebelumnya.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan konseptual dan empiris dalam memahami efektivitas Siskeudes sebagai instrumen pelaporan keuangan desa, khususnya di wilayah yang menghadapi kendala infrastruktur, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan dan pelatihan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Padahal, realisasi anggaran dana desa di Kabupaten Muara Enim setiap tahun mencapai 100%, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan kasus penyimpangan dan ketidaktepatan pelaporan (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam efektivitas pengelolaan Sistem Keuangan Desa dalam pelaporan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Pendekatan indikator efektivitas menurut Sutrisno

digunakan sebagai landasan konseptual untuk menilai kinerja Siskeudes, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan strategi peningkatan efektivitas sistem tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur mengenai manajemen keuangan desa dan rekomendasi praktis bagi perbaikan tata kelola keuangan desa di tingkat lokal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya memperkuat landasan konseptual serta menegaskan kebaruan penelitian, penulis merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang membahas efektivitas pengelolaan keuangan desa melalui penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Studi-studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika penerapan sistem keuangan berbasis digital di lingkungan desa serta berbagai tantangan yang menyertainya.

Penelitian oleh Ridwan (2019) yang berjudul “Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Godong Tataan, Kabupaten Pasawaran)” menelaah pengelolaan aplikasi Siskeudes di Desa Bogorejo, Kabupaten Pasawaran. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara sistem dan prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes telah memenuhi standar pertanggungjawaban, meskipun masih terdapat kekurangan dalam aspek pelatihan dan pendampingan teknis.

Novirania (2018) juga melakukan penelitian di desa yang sama dengan fokus pada “Implementasi Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pasawaran”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perangkat desa terhadap sistem sudah cukup baik, terutama dalam hal keterbukaan dan transparansi pelaporan anggaran. Meskipun demikian, belum banyak dibahas indikator teoritis efektivitas secara sistematis.

Selanjutnya, Wahyuni (2019) melalui penelitian “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara)” di Kabupaten Aceh Tenggara menemukan bahwa pengelolaan dana desa telah berjalan secara akuntabel dan transparan, namun masih menghadapi hambatan dalam aspek pengawasan dan sumber daya manusia.

Bobihu (2002) dalam studinya tentang “Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Bonepantai” menegaskan bahwa sistem telah berperan penting dalam menata pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa. Meskipun implementasinya relatif baik, tantangan dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa tetap menjadi isu utama.

Penelitian terbaru oleh Arum (2023) dalam topik “Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)” mengungkap bahwa faktor kompetensi sumber daya manusia, sosialisasi, serta pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Siskeudes. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan analisis deskriptif kualitatif, serta menekankan pentingnya manajemen perubahan untuk mendukung keberhasilan sistem.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu telah menjelaskan peran penting Siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, belum banyak studi yang secara spesifik mengukur efektivitas pengelolaan Siskeudes berdasarkan indikator yang terstruktur sebagaimana dikemukakan oleh Rahayu dkk. (2021), yang mencakup pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Selain itu, konteks lokal Kabupaten Muara Enim yang masih menggunakan sistem *offline* juga belum banyak dijadikan fokus utama dalam penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dari sisi konteks wilayah, pendekatan teori efektivitas yang terukur, serta fokus pada pelaporan keuangan desa yang belum banyak dibahas secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam perbaikan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif dan akuntabel.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam ranah studi pengelolaan keuangan desa, dengan fokus pada efektivitas penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di lingkungan pemerintahan desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif yang menyeluruh terhadap efektivitas pelaporan keuangan desa, tidak hanya dari aspek implementasi teknis, namun juga meninjau faktor penghambat dan strategi peningkatan efektivitas secara sistemik.

Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada persepsi pengguna dan aspek teknis sistem (Ridwan, 2019; Novirania, 2018; Bobihu, 2002), studi ini memanfaatkan lima indikator efektivitas, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata untuk menilai kinerja Siskeudes secara empiris.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno dalam Rahayu, Solihat, & Priyanti, yang mengidentifikasi lima dimensi utama dalam menilai efektivitas suatu program, yaitu: (1) pemahaman program, (2) ketepatan sasaran, (3) ketepatan waktu, (4) tercapainya tujuan, dan (5) perubahan nyata. Teori ini memberikan kerangka evaluatif yang sistematis dan menyeluruh untuk mengukur kinerja kebijakan atau program publik, khususnya dalam konteks kelembagaan pemerintahan daerah. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menggambarkan pelaksanaan teknis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), tetapi juga mengevaluasi secara kritis sejauh mana sistem tersebut berhasil mencapai tujuannya serta membawa dampak nyata bagi pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan temuan dari literatur internasional mengenai tata kelola keuangan berbasis digital dan transparansi fiskal publik sebagai pijakan teoritis. Studi oleh García-Sánchez *et al.* (2022), Rakhman dkk. (2021), dan Tavares & da Cruz (2020) memberikan perspektif global terkait bagaimana digitalisasi dan transparansi fiskal berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik, termasuk pada level pemerintahan lokal.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan teoretis dan praktis dalam penguatan tata kelola keuangan desa berbasis sistem digital, serta menjadi jembatan antara literatur nasional dan internasional dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pelaporan keuangan desa di Kabupaten Muara Enim. Pendekatan ini dianggap tepat karena mampu menggambarkan fenomena secara holistik dan kontekstual sesuai dengan kondisi riil di lapangan (Creswell, 2009). Pendekatan ini juga dinilai sesuai untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman langsung dari para pelaku yang terlibat, terutama dalam konteks kebijakan publik yang bersifat kompleks dan dinamis (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi efektivitas dari Sutrisno dalam Rahayu, Solihat, & Priyanti, yang mencakup lima indikator utama, yaitu: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Indikator

pemahaman program mengukur sejauh mana aparatur desa memahami tujuan, fungsi, dan prosedur dari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sedangkan ketepatan sasaran menilai apakah sistem ini benar-benar menyoar permasalahan utama dalam pelaporan keuangan desa. Ketepatan waktu merujuk pada kesesuaian pelaksanaan sistem dengan jadwal pelaporan yang telah ditentukan, sementara pencapaian tujuan menilai sejauh mana sistem mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Adapun perubahan nyata mencerminkan dampak konkret dari penerapan sistem terhadap perilaku aparatur, efisiensi administrasi, dan budaya tata kelola keuangan desa. Kelima indikator ini dijadikan dasar dalam menyusun instrumen wawancara, pedoman observasi, analisis data, serta interpretasi temuan secara sistematis. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi Siskeudes sebagai sistem informasi pelaporan keuangan berbasis digital dalam konteks pemerintahan desa.

Informan penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu menetapkan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan karena peneliti membutuhkan narasumber yang memiliki pemahaman mendalam serta keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa melalui Siskeudes. Informan kunci (*key informants*) dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, karena memiliki otoritas dan pemahaman strategis terhadap kebijakan implementasi sistem keuangan desa. Selain itu, informan utama lainnya meliputi Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa, serta Kepala Sub Bagian Keuangan.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah yang masih menerapkan Siskeudes secara offline dan menghadapi berbagai tantangan teknis serta sumber daya manusia dalam pelaporan keuangan desa.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi seperti peraturan daerah, laporan keuangan, dan arsip internal instansi terkait. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif menurut Miles *et al.* (2014), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan secara simultan sejak awal proses pengumpulan data hingga tahap interpretasi untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan indikator efektivitas pelaksanaan Siskeudes, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta strategi perbaikan yang dilakukan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja sistem keuangan desa, sekaligus menyajikan rekomendasi yang kontekstual untuk peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa di Kabupaten Muara Enim.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang difokuskan pada pelaksanaan dan efektivitas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pelaporan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Proses penelitian dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perumusan masalah, penentuan informan, pengumpulan data, hingga analisis, sebagaimana dijelaskan dalam metodologi penelitian sosial (Sahir, 2022). Informan dalam penelitian ini terdiri dari pejabat struktural di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif menurut Miles, *et al.* (2014), yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta

penarikan kesimpulan. Pembahasan dalam bab ini disusun berdasarkan lima indikator efektivitas, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata, serta disertai analisis terhadap faktor-faktor penghambat dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam penerapan Siskeudes.

3.1. Efektivitas Sistem Keuangan Desa dalam Pelaporan Keuangan Desa di Kabupaten Muara Enim

Laporan keuangan memiliki peran penting dalam organisasi pemerintahan di semua tingkat, termasuk desa, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Laporan yang baik mencerminkan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan seperti DPR atau DPRD, serta mendorong tercapainya tujuan organisasi. Pelaporan yang transparan dan akurat tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga sarana evaluasi atas efektivitas kebijakan dan penggunaan anggaran.

Dalam konteks pemerintahan desa, pelaporan keuangan memegang posisi strategis karena terkait langsung dengan pengelolaan dana desa yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penggunaan dana desa yang besar memerlukan sistem pelaporan yang mampu meminimalisir penyimpangan, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada publik. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat sistem pelaporan keuangan desa menjadi sangat penting dalam mendorong tata kelola yang baik di tingkat lokal.

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang tidak hanya mempermudah pengelolaan anggaran tetapi juga meningkatkan efisiensi pelaporan. Sistem ini dirancang untuk menjadi instrumen teknis yang terintegrasi dan berbasis aplikasi, sehingga memudahkan perangkat desa dalam menyusun laporan anggaran, realisasi belanja, dan pertanggungjawaban keuangan secara lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

Penerapan Siskeudes tidak hanya bertujuan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi dalam hal keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik. Siskeudes diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan yang selama ini terjadi dalam pelaporan keuangan desa, seperti keterlambatan laporan, ketidaksesuaian data, hingga lemahnya pengawasan. Melalui sistem ini, seluruh proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dapat dilakukan secara digital dan sesuai regulasi yang berlaku.

Sistem ini diharapkan memberikan dampak positif dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Selain itu, Siskeudes juga membuka peluang kolaborasi antara pemerintah desa dengan instansi pengawas, seperti Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam mempermudah akses terhadap data keuangan dan mempercepat proses audit.

Penelitian ini menggunakan indikator efektivitas dari Rahayu dkk. (2021), yang mencakup lima dimensi utama yaitu: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Kelima indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Siskeudes mampu meningkatkan kinerja pelaporan keuangan desa secara menyeluruh. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai implementasi Siskeudes di Kabupaten Muara Enim serta rekomendasi strategis untuk penguatan sistem di masa mendatang.

a. Pemahaman Program

Dimensi pemahaman program dalam konteks efektivitas pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merujuk pada sejauh mana aparatur desa memahami tujuan, mekanisme kerja, serta manfaat dari penggunaan Siskeudes dalam pelaporan keuangan desa. Pemahaman ini menjadi landasan penting bagi keberhasilan implementasi sistem, karena tanpa pemahaman yang memadai, program berisiko mengalami kesalahan dalam pelaksanaan teknis maupun administratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim, ditemukan bahwa sebagian besar aparatur desa memahami bahwa Siskeudes adalah alat bantu utama dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan desa. Namun, pemahaman ini masih bersifat umum dan belum merata di semua desa. Beberapa perangkat desa masih kebingungan dalam menjalankan fungsi-fungsi spesifik sistem, seperti input data, sinkronisasi anggaran, serta tahapan pelaporan semesteran. Hal ini terjadi karena perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja aparatur yang cukup signifikan antarwilayah.

Kesenjangan pemahaman tersebut diperparah oleh minimnya pelatihan berkelanjutan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pelatihan biasanya hanya diberikan satu kali dalam setahun, dan tidak semua perangkat desa memiliki kesempatan yang sama untuk mengikutinya. Aparatur yang baru dilantik juga sering tidak mendapatkan pembekalan khusus terkait sistem ini. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan pada satu atau dua orang operator saja dalam satu desa, sehingga apabila operator tersebut tidak hadir, proses pelaporan akan terhambat.

Pemahaman yang baik terhadap Siskeudes idealnya mencakup tiga aspek utama: (1) kemampuan memahami regulasi dan prinsip tata kelola keuangan desa, (2) keterampilan teknis dalam mengoperasikan sistem, dan (3) kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Ketiga aspek ini belum sepenuhnya dikuasai oleh semua aparatur desa. Hal ini berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, baik dari sisi ketepatan waktu, kelengkapan data, maupun ketaatan pada format dan standar pelaporan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi Siskeudes di Kabupaten Muara Enim sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman aparatur desa terhadap sistem. Pemahaman yang belum merata berpotensi menimbulkan kesalahan administratif, keterlambatan dalam pelaporan, serta penurunan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif, pendampingan teknis, dan evaluasi berkala guna memastikan sistem dapat berjalan optimal di seluruh desa secara merata.

b. Tepat Sasaran

Dimensi tepat sasaran mengukur sejauh mana pelaksanaan Siskeudes mampu mencapai target yang telah ditetapkan, khususnya dalam mendukung pelaporan keuangan desa yang sesuai dengan kebutuhan administrasi dan peraturan. Pelaksanaan yang tepat sasaran mencakup penggunaan sistem oleh pihak yang berwenang, dalam waktu dan konteks yang sesuai. Hal ini bertujuan agar output yang dihasilkan dari sistem benar-benar bermanfaat dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik di tingkat desa maupun oleh pemerintah daerah.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun seluruh desa di Kabupaten Muara Enim telah menerapkan Siskeudes, tidak semua desa dapat menggunakannya secara maksimal. Beberapa desa yang berada di daerah terpencil mengalami kendala dalam akses terhadap perangkat teknologi dan infrastruktur jaringan internet. Hal ini menyebabkan pelaporan masih dilakukan secara manual atau semi-digital, sehingga potensi keterlambatan dan ketidaksesuaian data semakin besar.

Selain itu, penempatan sumber daya manusia (SDM) belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan teknis penggunaan sistem. Beberapa perangkat desa yang ditugaskan mengelola keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan atau kemampuan komputer yang memadai. Akibatnya, penggunaan sistem menjadi tidak optimal dan sasaran pelaksanaan tidak tercapai secara menyeluruh. Hal ini berdampak langsung pada validitas dan reliabilitas laporan yang dihasilkan.

Tepat sasaran juga berarti bahwa sistem digunakan sesuai dengan regulasi dan prosedur teknis yang telah ditetapkan. Namun, ditemukan beberapa kasus di mana penggunaan Siskeudes dilakukan hanya untuk formalitas pelaporan, tanpa pemahaman mendalam terhadap setiap tahapan yang dilalui. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pembinaan dari dinas terkait masih perlu diperkuat agar pelaksanaan sistem benar-benar berdampak terhadap kualitas tata kelola keuangan desa.

Dengan demikian, untuk mencapai pelaksanaan yang tepat sasaran, perlu adanya peningkatan peran fasilitator teknis dari pemerintah daerah, distribusi pelatihan yang merata, serta penguatan peran pengawasan secara langsung. Evaluasi berkala terhadap implementasi di setiap desa juga diperlukan guna memastikan sistem dijalankan sesuai dengan fungsi dan tujuan awalnya. Jika hal ini dapat dilakukan secara konsisten, maka efektivitas penggunaan Siskeudes akan semakin meningkat dan dapat mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh.

c. Tepat Waktu

Dimensi tepat waktu menilai sejauh mana pelaporan keuangan desa dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketepatan waktu dalam pelaporan menjadi sangat penting karena informasi keuangan yang terlambat akan menghambat proses evaluasi dan pengambilan keputusan oleh pihak pengawas dan pembuat kebijakan, baik di tingkat kabupaten maupun pusat.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaporan keuangan desa di Kabupaten Muara Enim masih sering mengalami keterlambatan. Salah satu penyebab utamanya adalah kendala teknis seperti keterbatasan akses internet, terutama pada desa yang masih mengandalkan sistem offline. Selain itu, kesalahan teknis dalam penginputan data atau kerusakan perangkat juga sering mengakibatkan proses pelaporan menjadi tertunda.

Keterlambatan ini tidak hanya memengaruhi kredibilitas pemerintah desa, tetapi juga menghambat sinkronisasi data antara desa dan pemerintah daerah. Pelaporan yang tidak tepat waktu juga menyulitkan dalam pelaksanaan evaluasi anggaran dan penyusunan perencanaan pembangunan berikutnya. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pelaporan menyebabkan penundaan pencairan anggaran tahap berikutnya karena tidak terpenuhinya persyaratan administratif.

Siskeudes sebenarnya dirancang untuk mendukung pelaporan yang lebih cepat dan sistematis. Namun, manfaat ini tidak akan maksimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai dan kesiapan sumber daya manusia. Pelatihan teknis dan ketersediaan pendamping lapangan menjadi faktor krusial untuk memastikan pelaporan dilakukan secara tepat waktu.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan desa melalui Siskeudes, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan akses internet desa, penyediaan operator yang kompeten, serta sistem pengingat berbasis digital yang terintegrasi dengan jadwal pelaporan. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, keterlambatan pelaporan dapat diminimalkan dan efektivitas pengelolaan keuangan desa akan semakin meningkat.

d. Tercapainya Tujuan

Dimensi tercapainya tujuan berfokus pada keberhasilan sistem dalam memenuhi sasaran utama yaitu menciptakan pelaporan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan Siskeudes diharapkan mampu menghasilkan laporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan desa dan memudahkan proses audit serta monitoring oleh lembaga pengawasan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar laporan keuangan desa di Kabupaten Muara Enim telah menunjukkan perbaikan signifikan dari segi struktur, kelengkapan data, dan ketepatan format. Hal ini menunjukkan bahwa Siskeudes telah mampu mendorong aparatur desa untuk lebih disiplin dan tertib administrasi. Dengan adanya sistem ini, pembuatan laporan tidak lagi dilakukan secara manual, sehingga mengurangi potensi kesalahan input data dan mempersingkat waktu penyusunan dokumen.

Informan menyebutkan bahwa Siskeudes telah mempermudah proses pelacakan aliran dana desa serta mempercepat proses verifikasi anggaran yang dilakukan oleh pihak kecamatan maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu, penggunaan sistem ini secara konsisten turut mendukung kelancaran audit oleh Inspektorat Daerah, karena dokumen yang tersedia sudah sesuai dengan format baku dan dapat diakses secara digital.

Namun, meskipun secara umum tujuan implementasi sistem ini telah mulai tercapai, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi konsistensi penerapan di lapangan. Beberapa desa masih menganggap pelaporan melalui Siskeudes sebagai beban tambahan, bukan sebagai bagian dari proses tata kelola yang harus dijalankan secara profesional. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program berjalan sekadar memenuhi kewajiban administratif, bukan karena adanya dorongan intrinsik untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Agar tujuan implementasi Siskeudes benar-benar tercapai secara menyeluruh, dibutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan desa untuk mengintegrasikan sistem ini dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Pelatihan berkelanjutan, supervisi teknis, serta reward system bagi desa yang berhasil menyusun laporan tepat waktu dan sesuai standar dapat menjadi stimulus positif. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan Siskeudes tidak hanya terlihat dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari dampak nyata terhadap tata kelola keuangan desa yang semakin baik.

e. Perubahan nyata

Dimensi perubahan nyata menekankan pada dampak konkret yang muncul setelah implementasi Siskeudes, baik dari sisi peningkatan kapasitas aparatur desa, penataan administrasi yang lebih baik, maupun penguatan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Perubahan ini menjadi indikator penting untuk menilai apakah sistem yang diterapkan benar-benar membawa manfaat berkelanjutan bagi tata kelola keuangan desa.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa setelah penerapan Siskeudes, terjadi peningkatan kesadaran di kalangan perangkat desa terhadap pentingnya keteraturan pelaporan dan ketertiban administrasi. Beberapa desa bahkan mulai menyusun standar operasional prosedur (SOP) internal untuk mempercepat penginputan data dan proses pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah mendorong lahirnya inovasi administratif dari dalam desa itu sendiri.

Di sisi lain, kualitas laporan keuangan desa juga mengalami perbaikan secara signifikan. Laporan menjadi lebih terstruktur, lengkap, dan mudah dipahami. Kesalahan dalam penginputan data menurun karena sistem secara otomatis memberikan peringatan

jika terjadi kekeliruan angka atau format. Ini sangat membantu dalam meminimalkan risiko temuan audit yang berulang.

Selain itu, transparansi publik juga mengalami peningkatan. Beberapa desa telah mulai memanfaatkan fitur cetak dan distribusi laporan dalam bentuk ringkasan kepada masyarakat melalui papan pengumuman atau media sosial desa. Hal ini menciptakan ruang partisipasi warga dalam mengawasi dan memahami penggunaan anggaran, sehingga mendorong akuntabilitas dari bawah.

Meski demikian, tidak semua desa mengalami perubahan signifikan. Masih ada desa yang menerapkan Siskeudes secara formalitas, tanpa perubahan berarti dalam cara kerja internal atau peningkatan kualitas pelaporan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperluas praktik baik ke seluruh wilayah dan tidak hanya terpusat pada desa yang sudah maju.

Dengan demikian, perubahan nyata setelah penerapan Siskeudes perlu terus dipantau dan diperkuat melalui insentif, pendampingan, dan pertukaran praktik terbaik antar desa. Ketika sistem tidak hanya diterapkan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai budaya kerja, maka efektivitasnya akan dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan desa.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pelaporan keuangan desa di Kabupaten Muara Enim dapat dianalisis melalui lima indikator utama, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata, sebagaimana dikemukakan oleh Rahayu dkk. (2021). Kelima indikator ini saling berkaitan dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana sistem berjalan secara optimal serta mampu memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa.

Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menyoroti pentingnya pemahaman pengguna terhadap sistem, dukungan kelembagaan, dan keberadaan pelatihan teknis sebagai penentu utama efektivitas implementasi Siskeudes (Ridwan, 2019; Novirania, 2018). Di Kabupaten Muara Enim, pemahaman aparatur desa terhadap sistem secara umum cukup baik, tetapi masih terdapat kesenjangan dalam aspek teknis dan penggunaan sistem secara menyeluruh, terutama pada desa-desa yang minim akses pelatihan dan pendampingan. Dimensi tepat waktu dan tepat sasaran juga masih menjadi tantangan, khususnya dalam konteks pelaporan berbasis *offline* yang rawan keterlambatan dan kesalahan input data.

Berbeda dengan temuan Wahyuni (2019) yang menyebutkan bahwa sistem berjalan lancar di daerah dengan infrastruktur teknologi yang baik, penelitian ini mengungkap bahwa desa-desa di Kabupaten Muara Enim menghadapi kendala besar dalam akses internet, perangkat keras yang terbatas, serta kualitas sumber daya manusia yang belum merata. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan kontekstual dalam mengimplementasikan sistem digital di tingkat desa, termasuk perlunya adaptasi terhadap kondisi geografis dan kapasitas lokal.

Selain itu, keberhasilan implementasi Siskeudes juga sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah desa, pendamping desa, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Koordinasi antarlembaga ini mendukung tercapainya tujuan pelaporan keuangan secara sistematis, meskipun belum seluruhnya berjalan optimal. Temuan ini mendukung pandangan Arum (2023) yang menekankan bahwa efektivitas sistem keuangan desa tidak hanya bergantung pada perangkat lunaknya, tetapi juga pada dukungan kelembagaan dan keberlanjutan pembinaan SDM.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur informasi, lemahnya pengawasan pascapelatihan, dan belum maksimalnya integrasi sistem secara *online* menjadi hambatan serius dalam meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan. Tanpa perbaikan di aspek tersebut, potensi sistem untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien belum dapat dimanfaatkan secara penuh.

Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini memperkuat hasil-hasil studi terdahulu dan sekaligus memberikan kontribusi empiris dalam konteks implementasi sistem keuangan desa di wilayah rural yang menghadapi tantangan infrastruktur dan keterbatasan sumber daya manusia. Pendekatan kualitatif yang digunakan memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika pelaksanaan kebijakan keuangan berbasis sistem, yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penguatan tata kelola keuangan desa yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama terkait efektivitas pelaporan keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), penelitian ini juga menemukan beberapa hal menarik yang muncul selama proses pengumpulan data. Salah satu temuan tersebut adalah adanya inisiatif mandiri dari beberapa aparatur desa untuk mengikuti pelatihan teknologi informasi secara informal, baik melalui pelatihan berbayar maupun belajar secara otodidak, guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengoperasikan Siskeudes secara lebih maksimal. Inisiatif ini menunjukkan adanya kesadaran yang tumbuh dari dalam diri aparatur desa tentang pentingnya peningkatan kapasitas, meskipun pelatihan formal dari pemerintah daerah belum sepenuhnya merata.

Temuan menarik lainnya adalah praktik kolaborasi antar desa yang saling membantu dalam menyelesaikan kendala teknis penggunaan aplikasi, terutama bagi desa yang belum memiliki operator atau tenaga IT yang memadai. Praktik semacam ini menciptakan semangat gotong royong digital di tingkat lokal, yang menjadi modal sosial penting dalam memperkuat implementasi sistem. Selain itu, terdapat juga desa-desa yang secara proaktif membuat dokumentasi manual penggunaan Siskeudes versi mereka sendiri sebagai panduan internal, yang menunjukkan adaptasi dan inovasi lokal dalam menghadapi keterbatasan pelatihan teknis dari pusat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang berpedoman pada teori dan temuan lapangan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai efektivitas Sistem Keuangan Desa dalam pelaporan keuangan desa di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Efektivitas Sistem Keuangan Desa dalam pelaporan keuangan desa di Kabupaten Muara Enim tergolong cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Beberapa kendala utama meliputi lemahnya aplikasi yang digunakan, keterbatasan jaringan internet di sejumlah desa, serta sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memadai dalam mengoperasikan sistem dan memahami tata kelola keuangan desa secara menyeluruh.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui peningkatan kapasitas sistem agar mampu diakses oleh pengguna dalam jumlah besar, penyediaan fasilitas jaringan internet dan perangkat pendukung seperti laptop dan komputer di setiap kantor desa, serta pelatihan dan pendampingan secara rutin bagi aparatur desa dalam pelaporan keuangan melalui sistem Siskeudes. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas pelaporan keuangan desa dapat terus ditingkatkan menuju tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini terbatas pada wilayah Kabupaten Muara Enim dengan jumlah informan yang relatif sedikit dan fokus pada pihak internal dinas, sehingga hasilnya bersifat kontekstual dan belum dapat digeneralisasikan. Keterbatasan waktu, biaya, dan akses dokumen juga membatasi pendalaman analisis, khususnya pada aspek pengawasan dan pelibatan pemerintah desa secara langsung.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas Siskeudes secara komparatif di beberapa daerah, menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak sistem secara lebih objektif, serta mengevaluasi integrasi teknologi daring dan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim yang telah memberikan dukungan, izin, dan fasilitas dalam menyukseskan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arum, S. N. (2023). *Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. Repository UIN Raden Intan. <https://repository.radenintan.ac.id/>
- Bobihu, A. (2002). *Evaluasi Penggunaan Sistem Keuangan Desa di Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Bobihu, A. (2002). *Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Bonepantai (Studi Kasus di Desa Tamboo Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango)* [Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo]. Institutional Repository UNG. <https://repository.ung.ac.id/>
- Creswell, J. W. (2009). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim. (2024). *Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023–2024*. Muara Enim: DPMD Kabupaten Muara Enim.
- García-Sánchez, I. M., Cuadrado-Ballesteros, B., & Frías-Aceituno, J. V. (2022). Digitalization and Local Government Transparency: Evidence from Worldwide municipalities. *Local Government Studies*, 48(3), 443–464. <https://doi.org/10.1080/03003930.2022.2032119>
- Indrajit, M. (2020). Penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan melalui sistem informasi. *Jurnal Ilmu Sosial Pemerintahan*, 12(1), 76–85. <https://jurnal.ipdn.ac.id/index.php/JIS/article/view/1178>
- Mardiasmo. (2017). *Otonomi & manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marlina, R. (2019). Efektivitas pengawasan internal terhadap pelaporan keuangan desa: Studi sistem pengawasan berbasis aplikasi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 7(2), 99–108. <https://jurnal.ipdn.ac.id/index.php/JAP/article/view/980>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Novirania, A. (2018). *Implementasi aplikasi keuangan desa (Siskeudes) di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pasawaran* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. Repository UIN Raden Intan. <https://repository.radenintan.ac.id/>
- Novirania, N. (2018). Analisis Efektivitas Penerapan Siskeudes di Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 45–56.

- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Sumedang: Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rahayu, N. S., Solihat, Y., & Priyanti, E. (2021). Efektivitas Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 77–90. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v8i1.4159>
- Rakhman, F., Kusnadi, D., & Rahmawati, A. (2021). Enhancing financial accountability through digital governance: A case study in Indonesian villages. *International Review of Administrative Sciences*, 87(4), 788–803. <https://doi.org/10.1177/00208523211000495>
- Ridwan, M. (2019). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 5(2), 34–43.
- Ridwan, M. A. (2019). *Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pasawaran)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. Repository UIN Raden Intan. <https://repository.radenintan.ac.id/>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian*. Medan: KBM Indonesia.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tavares, A. F., & da Cruz, N. F. (2020). Explaining the transparency of local governments: A multilevel analysis. *Governance*, 33(2), 263–285. <https://doi.org/10.1111/gove.12426>
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wahyuni, S. (2019). *Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara)* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. <http://repository.umsu.ac.id/>